PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL

(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR)

JURNAL

oleh:

Nama : Hasna Amalia

No. Mahasiswa : 09312272

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2013

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR)

Jurnal

diajukan oleh:

Nama : Hasna Amalia

No.Mahasiswa : 09312272

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 20-06-2013

Dosen Pembimbing,

Muqodim, Drs. M.B.A, Ak.

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)

Hasna Amalia
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
amalia_hasna47@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Variabel independen adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, SiLPA dan variabel dependennya adalah Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pusat. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan software SPSS 16 untuk mengolah data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja Modal

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Remaining Over the Budget Calculations toward Capital Expenditure. Independent variables are Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Remaining Over the Budget Calculations, and the dependent variable is Capital Expenditure. This study used Budget Realization Report data from 29 districts and 9 cities in East Java in 2007 to 2011 from BPK Center Report. Instrument used for analyses is multiple linear regressions. This study used SPSS 16 for processing data. The result showed that Regional Taxes, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Remaining Over the Budget Calculations has positive influence against the capital expenditure. Meanwhile, Regional Retribution has no influence on the capital expenditure.

Key Words : Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Remaining Over the Budget Calculations, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik pemerintah daerah. Anggaran dalam Pemerintah Daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan (UU 32/2004).

Peningkatan pelayanan di berbagai sektor sangat diharapkan, terutama di sektor publik. Dengan adanya peningkatan pelayanan kepada publik di suatu daerah, dapat berakibat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik

oleh pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal dengan menggunakan beberapa variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

KAJIAN PUSTAKA

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (PMK 93/2011).

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (UU 28/2009).

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU 28/2009).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 33/2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU 33/2004).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Permendagri 13/2006).

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Sianturi (2010) tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal yaitu pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap belanja modal. Sumarmi (2009) melakukan penelitian mengenai DAU dan DAK terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Darwanto dan Yustikasari (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh DAU terhadap belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Solikin (2007) juga memperkuat bahwa adanya hubungan positif antara DAU dengan belanja modal..

Ardhini (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh SiLPA terhadap belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Hipotesis Penelitian

H_1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

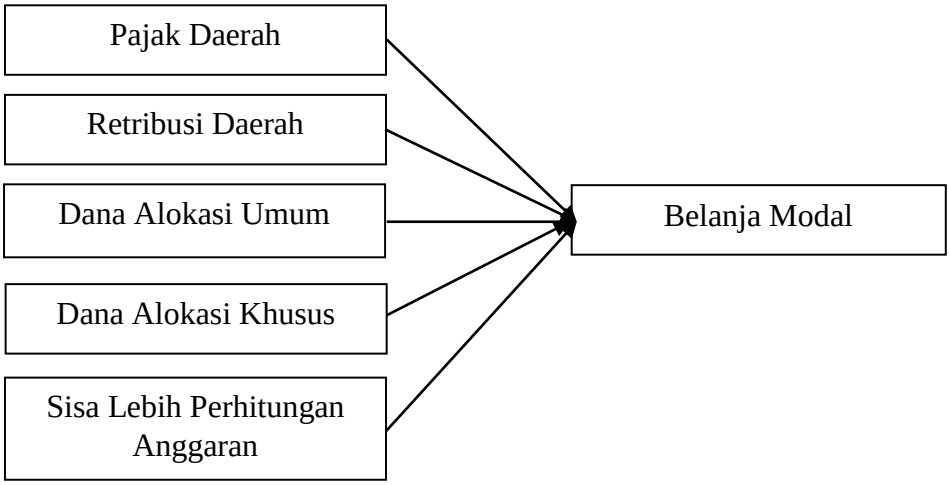
H_2: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H_3: DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H_4: DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H_5: SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN



Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dimana diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pusat.

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menghitung rata – rata (*mean),* maksimum, minimum, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + \beta_5 SiLPA + e$$

HASIL ANALISIS

Analisis Statistik Deskriptif

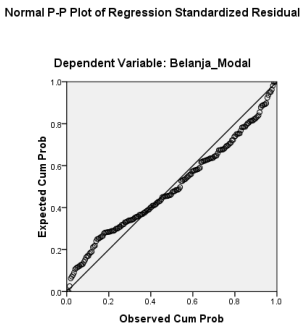
Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	190	2.643.875.425,00	1.488.358.147.753,27	38.095.401.813,69	124.811.452.498,12
Retribusi Daerah	190	2.274.211.802,75	209.834.317.887,85	26.923.119.112,87	29.381.672.599,85
DAU	190	188.025.000.000,00	1.058.648.472.000,00	522.415.807.807,35	176.272.044.927,03
DAK	190	903.700.000,00	108.468.200.000,00	47.995.491.121,05	23.175.578.082,68
SiLPA	190	7.948.417.368,86	1.579.082.113.082,00	119.913.952.150,23	175.798.030.743,93
Belanja Modal	190	44.601.848.936,00	1.143.038.576.007,00	162.910.024.550,46	119.321.886.848,82
Valid N (listwise)	190				

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data dikatakan normal jika data atau titik – titik tersebar di sekitar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Dengan melihat tampilan grafik *normal probability plot* menunjukkan titik – titik menyebar di sekitar dan searah dengan garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan dengan *tolerance* value masing – masing variabel independen yang berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10.

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Daerah	0,361	2,771	Tidak terjadi multikolinieritas
Retribusi Daerah	0,206	4,863	Tidak terjadi multikolinieritas
DAU	0,510	1,963	Tidak terjadi multikolinieritas
DAK	0,578	1,729	Tidak terjadi multikolinieritas
SiLPA	0,388	2,580	Tidak terjadi multikolinieritas

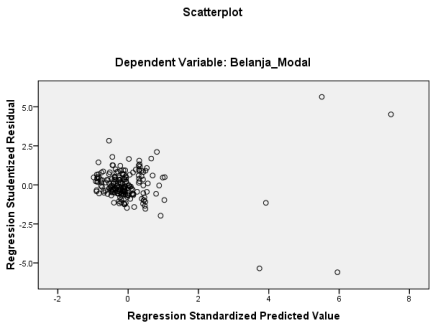
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.859[a]	.738	.731	61884016268.51988	1.927

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak Daerah, DAU, Retribusi Daerah
b. Dependent variable: Belanja Modal

Dw Test yang diperoleh sebesar 1,927 berada di antara d_u = 1,817 dan (4-d_u) = 2,183 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil analisis regresi linear berganda, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BM = 25871139430,532 + 0,127PD + 0,114RD + 0,092DAU + 0,508DAK + 0,471SiLPA

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t statistik melihat pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25871139430.532	14350456793.946		1.803	.073
	Pajak Daerah	.127	.060	.132	2.109	.036
	Retribusi Daerah	.114	.338	.028	.338	.736
	DAU	.092	.036	.137	2.585	.011
	DAK	.508	.255	.099	1.990	.048
	SiLPA	.471	.041	.693	11.442	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal .Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pajak daerah maka belanja modal semakin tinggi pula. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sianturi (2010) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Dari hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya retribusi daerah tidak akan mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianturi (2010).

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat diketahui bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DAU akan meningkatkan belanja modal demikian pula sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian Sumarmi (2009) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Dari hasil analisis data di atas, dapat diketahui bahwa SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi SiLPA akan meningkatkan belanja modal demikian pula sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ardhini (2011) yang menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka penelitian ini berhasil menemukan bahwa secara parsial pajak daerah, DAU, DAK, dan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat lebih menggunakan rentang waktu lebih panjang dan menggunakan variabel lebih bervariasi, dengan menambahkan variabel independen lain baik jenis – jenis atau ukuran penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan, seperti jumlah penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhini, *Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Prespektif Teori Keagenan: Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Darise, Nurlan, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Indeks, Jakarta, 2008.

Darwanto dan Yustikasari, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Symposium Nasional Akuntansi X Universitas Hassanudin Makasar, Juli 2007, Hal. 1-25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sianturi, Agave, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2010.

Solikin, Ikin, *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat*, Skripsi S-1, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2007.

Sumarmi, Saptaningsih, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*, Paper Akmenika UPY, Vol. 4, 2009, Hal. 55 – 66.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.